

BAB III

TINJAUAN LOKASI & GAGASAN

3.1 Tinjauan Umum Solo Raya

Wilayah Surakarta Raya, yang dikenal dengan istilah Subosukawonosraten, merupakan kawasan metropolitan regional di Provinsi Jawa Tengah yang meliputi Kota Surakarta serta enam kabupaten di sekitarnya, yaitu Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten. Kawasan ini secara historis merupakan bagian dari wilayah administratif Karesidenan Surakarta yang telah berkembang sejak masa kolonial Belanda pada akhir abad ke-19 dan hingga saat ini masih menunjukkan keterkaitan spasial, sosial, dan ekonomi yang kuat antarwilayah (Aziz et al., 2023).

Dari aspek demografis, Surakarta Raya memiliki jumlah penduduk sekitar 6,7 juta jiwa, dengan proporsi penduduk perkotaan yang cukup dominan. Kondisi ini menunjukkan tingkat urbanisasi yang tinggi serta meningkatnya kebutuhan terhadap penyediaan fasilitas pelayanan publik, termasuk fasilitas pendidikan yang merata dan inklusif. Selain itu, berdasarkan analisis tutupan lahan berbasis sistem informasi geografis, kawasan terbangun di wilayah ini mencapai sekitar 43% dari total luas wilayah, yang menunjukkan adanya intensitas perkembangan kawasan yang cukup signifikan (Aziz et al., 2023).

Dalam konteks pengembangan fasilitas pendidikan, Surakarta Raya memiliki peran strategis sebagai pusat layanan pendidikan di kawasan regional Jawa Tengah bagian selatan. Keberadaan berbagai institusi pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi menjadikan kawasan ini sebagai salah satu pusat pertumbuhan pendidikan. Namun demikian, dalam konteks pendidikan inklusif, distribusi fasilitas yang benar-benar dirancang secara khusus untuk mengakomodasi kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus masih belum merata.

3.2 Data Fisik Kabupaten Boyolali

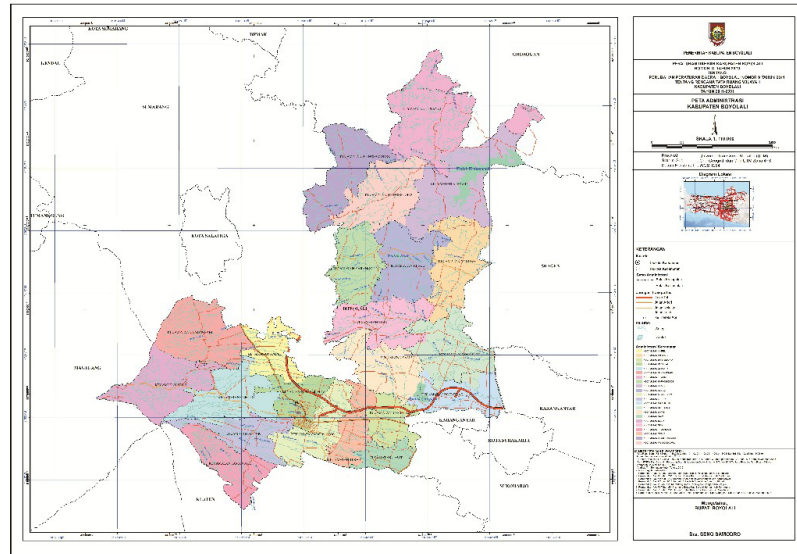
3.2.1 Tinjauan Geografis Kabupaten Boyolali

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Jawa Tengah yang termasuk dalam kawasan strategis Solo Raya. Secara geografis, kabupaten ini memiliki posisi yang cukup penting karena berada di antara jalur penghubung utama antara Kota Surakarta dan Kota Semarang, sehingga berperan dalam mendukung perkembangan wilayah secara regional. Secara koordinat, Kabupaten Boyolali terletak pada kisaran 110°22'–110°50' Bujur Timur dan 7°07'–7°36' Lintang Selatan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam publikasi *Kabupaten Boyolali Dalam Angka*, luas wilayah Kabupaten Boyolali mencapai sekitar ±1.015,10 km² yang terbagi ke dalam 22 kecamatan. Kondisi topografi wilayahnya cukup beragam, meliputi dataran rendah hingga kawasan perbukitan dan lereng pegunungan, khususnya pada wilayah yang berbatasan dengan Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Keberagaman kondisi alam tersebut menghasilkan iklim yang relatif sejuk serta kualitas lingkungan yang baik, sehingga berpotensi mendukung kegiatan pendidikan, terutama yang berbasis interaksi dengan lingkungan luar ruang.

Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan
- Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, dan Kota Surakarta
- Sebelah Selatan : Kabupaten Klaten dan Daerah Istimewa Yogyakarta
- Sebelah Barat : Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang



Gambar 22 Peta Administrasi Boyolali
Sumber (Pemda Boyolali, 2021)

Letak geografis tersebut menempatkan Kabupaten Boyolali pada posisi yang strategis dalam jaringan pergerakan kawasan Solo Raya, sehingga memiliki tingkat aksesibilitas regional yang sangat baik. Keberadaan wilayah ini yang terhubung langsung dengan jalur utama antar kota, serta kedekatannya dengan Bandara Adi Soemarmo dan jaringan jalan provinsi, semakin memperkuat peran Boyolali sebagai lokasi yang potensial untuk pengembangan fasilitas publik, khususnya di bidang pendidikan dengan cakupan pelayanan yang lebih luas.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam dokumen perencanaan daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021–2026, sektor pendidikan ditetapkan sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan daerah guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dukungan kebijakan ini, apabila dipadukan dengan kondisi geografis yang relatif nyaman dan lingkungan yang kondusif, menjadikan Boyolali memiliki potensi strategis untuk pengembangan Sekolah Inklusif Terpadu. Pengembangan ini diharapkan mampu menghadirkan lingkungan belajar yang tidak hanya aksesibel dan inklusif,

tetapi juga mendukung proses pembelajaran yang holistik, adaptif, dan berkelanjutan.

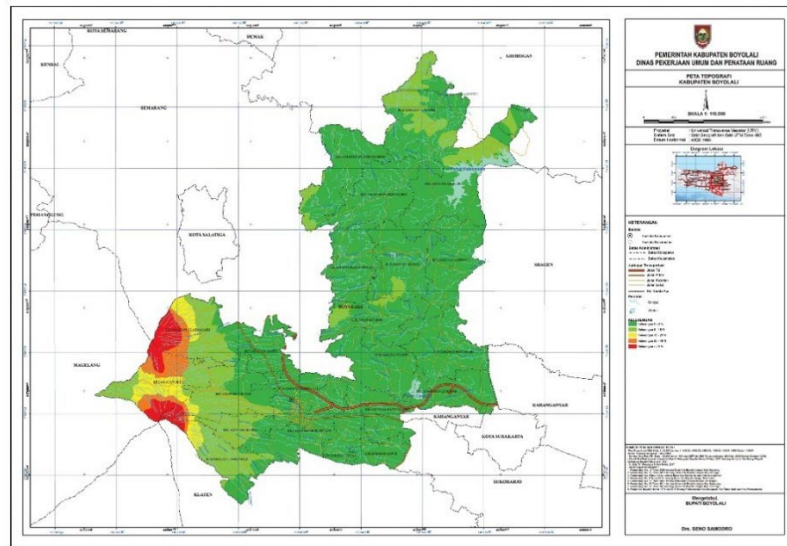
3.2.2 Tinjauan Topografi di Kabupaten Boyolali

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2021–2026 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali (2021), Topografi Kabupaten Boyolali terbagi dalam dua zona utama. Wilayah dataran tinggi di bagian barat — meliputi Kecamatan Selo, Cepogo, dan Ampel — berada pada ketinggian 1.000–1.500 mdpl dengan kontur curam dan suhu sejuk, sehingga pengembangan fasilitas pendidikan di kawasan ini memerlukan penyesuaian seperti terasering, penguatan struktur, dan penanganan aksesibilitas khusus.

Wilayah dataran rendah tersebar di bagian selatan, tengah, dan utara pada elevasi 75–400 mdpl, mencakup Kecamatan Teras, Banyudono, Sawit, Mojosongo, Ngemplak, dan beberapa kecamatan lainnya. Kawasan ini memiliki lahan relatif datar yang lebih berkembang sebagai area permukiman dan perkotaan, sehingga lebih mendukung pembangunan fasilitas pendidikan dari segi kemudahan akses, efisiensi konstruksi, dan ketersediaan infrastruktur.

Dalam konteks perancangan Sekolah Inklusif Terpadu, kawasan dataran rendah dengan topografi yang relatif landai menjadi pilihan yang lebih sesuai. Beberapa kecamatan yang berpotensi sebagai lokasi perancangan antara lain Kecamatan Teras, Mojosongo, Banyudono, dan Ngemplak, yang secara umum memiliki karakter lahan datar, aksesibilitas yang baik, serta ketersediaan infrastruktur yang memadai. Kondisi topografi tersebut memudahkan penerapan prinsip aksesibilitas universal seperti jalur ramp, sirkulasi yang jelas, dan konektivitas antar ruang yang optimal. Selain itu, lahan yang landai mendukung pengembangan ruang luar seperti taman belajar, area bermain, dan ruang terbuka hijau yang berperan penting dalam

menciptakan lingkungan belajar yang sehat, aman, dan mendukung pendekatan *healing environment* bagi seluruh peserta didik.



Gambar 23 Peta Topografi Kabupaten Boyolali
Sumber (Pemda Boyolali, 2021)

3.2.3 Kondisi Geologi dan Hidrologi Kabupaten Boyolali

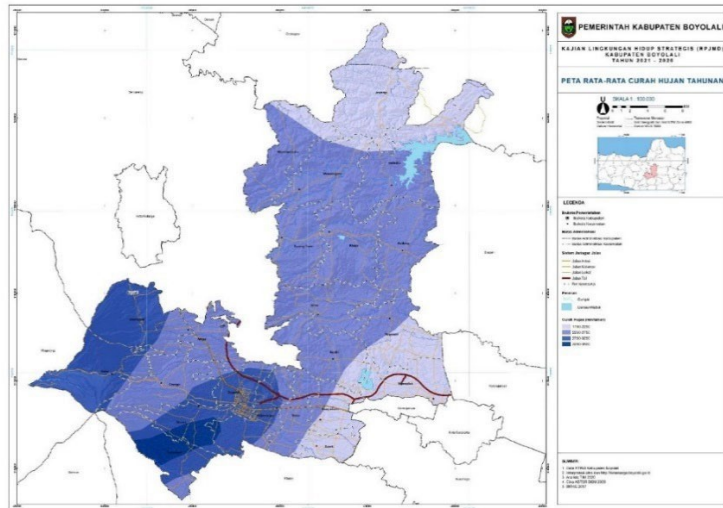
Berdasarkan RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2021–2026 (Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali, 2021), kondisi geologi wilayah ini didominasi material vulkanik dari Gunung Merapi dan Merbabu dengan karakteristik tanah andosol yang subur dan berdaya serap air tinggi. Pada dataran rendah, struktur tanah cenderung lebih padat dengan permeabilitas yang bervariasi, sehingga memerlukan penanganan terkait drainase, erosi, dan stabilitas lahan.

Secara hidrologis, ketersediaan air di Boyolali tidak merata. Wilayah utara seperti Kecamatan Wonosegoro, Wonosamodro, Juwangi, Kemusu, Andong, dan Karanggede tergolong kawasan non-Cekungan Air Tanah (non-CAT) yang rentan kekeringan musiman, sedangkan wilayah lereng seperti Kecamatan Tamansari dan Musuk menghadapi keterbatasan akses air bersih akibat muka air tanah yang dalam. Hal ini menunjukkan

Implikasi terhadap perancangan Sekolah Inklusif Terpadu mencakup penerapan strategi pengelolaan air seperti *rainwater harvesting*, sumur resapan, dan sistem drainase berkelanjutan. Dalam pendekatan *healing environment*, elemen air seperti kolam refleksi atau taman air juga dapat diintegrasikan sebagai bagian dari desain yang memberikan efek menenangkan, sehingga berkontribusi pada kenyamanan psikologis peserta didik.



3.2.4 Kondisi Klimatologi



Gambar 25 Peta Curah Hujan Tahunan
Sumber (Pemda Boyolali, 2021)

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2021–2026 (Pemerintah Kabupaten Boyolali, 2021), wilayah ini beriklim tropis dengan rata-rata curah hujan tahunan sekitar 2.212 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari dengan rata-rata 277,50 mm, menunjukkan fluktuasi musiman yang signifikan antara musim hujan dan kemarau.

Kondisi ini memiliki dua implikasi utama dalam perancangan. Di satu sisi, tingginya curah hujan menjadi potensi ketersediaan air permukaan yang dapat dimanfaatkan melalui strategi *rainwater harvesting*. Di sisi lain, intensitas hujan yang tinggi menuntut sistem pengelolaan drainase yang komprehensif, meliputi area resapan dan pengendalian limpasan permukaan, guna mengantisipasi genangan serta mendukung keberlanjutan dan kenyamanan lingkungan sekolah.

Tabel 23 Curah Hujan Kecamatan di Boyolali

No	Curah Hujan	Kecamatan
1	1750-2250	Banyudono, Juwangi, Kemusu, Ngemplak, Nogosari, Sambu, Sawit, Teras, Wonosamodro, Wonosegoro

2	2250-2750	Ampel, Andong, Banyudono, Boyolali, Cepogo, Gladagsari, Juwangi, Karanggede, Kemusu, Klego, Mojosongo, Musuk, Nogosari, Sambi, Sawit, Selo, Simo, Tamansari, Teras, Wonosamodro, Wonosegoro
3	2750-3250	Ampel, Boyolali, Cepogo, Gladagsari, Mojosongo, Musuk, Selo, Tamansari, Teras
4	3250-3500	Mojosongo, Musuk, Tamansari

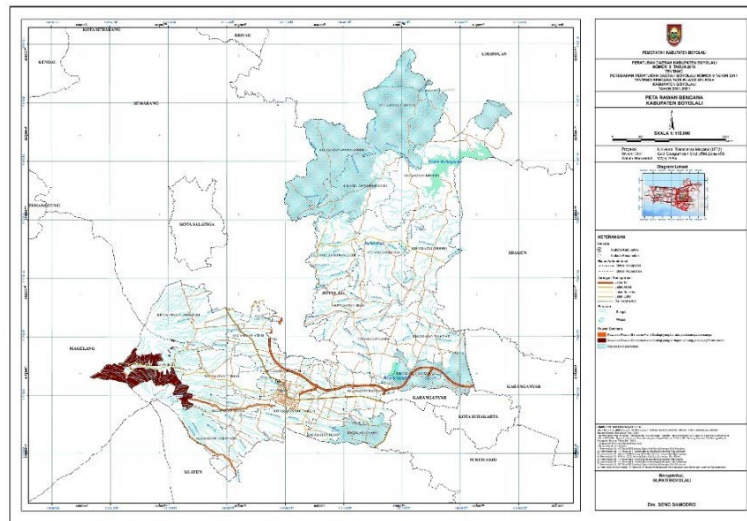
Sumber : Pemda Boyolali (2021)

3.2.5 Tinjauan Potensi Rawan Bencana

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2021–2026 (Pemerintah Kabupaten Boyolali, 2021), keragaman bentang alam wilayah ini mulai dari dataran rendah, perbukitan, hingga lereng gunung berapi menyebabkan tingkat kerentanan terhadap berbagai bencana, antara lain tanah longsor, banjir, letusan gunung berapi, angin puting beliung, kekeringan, dan gempa bumi.

Dalam konteks perancangan Sekolah Inklusif Terpadu, kondisi ini menuntut pertimbangan mitigasi bencana yang komprehensif, terutama mengingat peserta didik berkebutuhan khusus (ABK) memiliki keterbatasan mobilitas dan respons dalam situasi darurat. Pemilihan tapak perlu memprioritaskan kawasan dengan tingkat kerawanan rendah, sistem drainase yang baik, dan kondisi tanah yang stabil.

Secara arsitektural, prinsip *resilient design* perlu diintegrasikan melalui penyediaan jalur evakuasi yang jelas dan aksesibel, ruang terbuka sebagai titik kumpul darurat, serta struktur bangunan yang memenuhi standar ketahanan gempa. Dengan demikian, perancangan sekolah tidak hanya berorientasi pada kenyamanan, tetapi juga menghadirkan lingkungan belajar yang aman dan tangguh terhadap potensi risiko bencana.



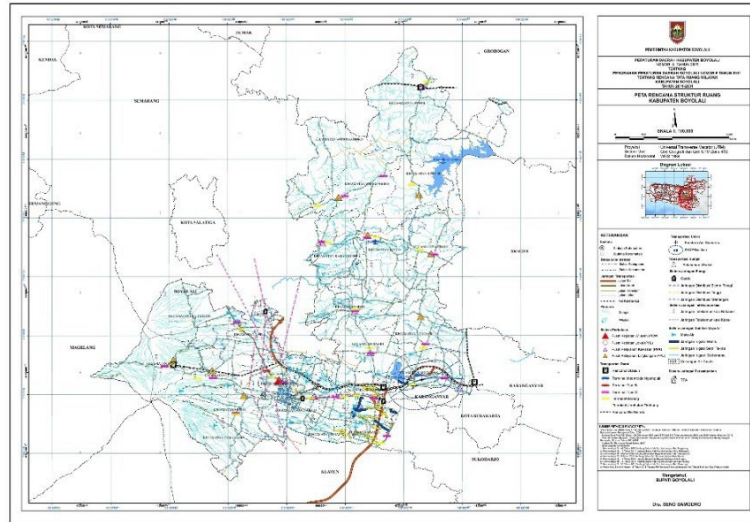
Gambar 26 Peta Rawan Bencana Kabupaten Boyolali
Sumber (Pemda Boyolali, 2021)

Tabel 24 Bencana Alam Kecamatan di Boyolali

Bencana Alam	Kawasan/ Wilayah
Banjir	Kecamatan Juwangi, Wonosamodro, Ngemplak, Nogosari, Sawit, Banyudono, Kemusu, dan Wonosegoro
Banjir Lahar Dingin	Kecamatan Selo, Gladagsari, Musuk, Cepogo, Ampel, Boyolali, Mojosongo
Tanah Longsor/ Gerakan Tanah	Kecamatan Selo, Cepogo, Ampel, Kemusu, Klego, dan Musuk
Letusan Gunung Berapi	Kecamatan Selo (Desa Suroteleng), Kecamatan Cepogo, Kecamatan Musuk.
Kebakaran Hutan	Kecamatan Ampel, Selo, Musuk, Cepogo, Juwangi, dan Wonosegoro
Angin Topan	Semua kecamatan di Boyolali
Kekeringan	Kecamatan Musuk, Sambu, Nogosari, Simo, Andong, Wonosegoro, Kemusu, dan Juwangi
Gempa Bumi	Kecamatan Selo, Musuk, Cepogo, Banyudono, dan Sawit

Sumber : Pemda Boyolali (2021)

3.2.6 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali



Gambar 27 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Boyolali
Sumber (Pemda Boyolali, 2021)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali (Pemda Boyolali, 2019), penataan ruang wilayah diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan terintegrasi. Dalam konteks pendidikan, kebijakan ini menekankan penyediaan fasilitas pendidikan yang tersebar merata, mudah diakses, dan mampu mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, perencanaan Sekolah Inklusif Terpadu perlu mempertimbangkan keterkaitan dengan sistem tata ruang agar dapat berfungsi optimal dalam melayani masyarakat.

Terdapat empat kebijakan tata ruang yang berkaitan langsung dengan pengembangan fasilitas pendidikan inklusif, yaitu:

- Pengembangan pusat pelayanan
Mendorong ketersediaan fasilitas pendidikan sebagai layanan publik utama pada setiap tingkat pelayanan wilayah.
- Pengembangan sistem jaringan transportasi
Berperan meningkatkan aksesibilitas menuju fasilitas pendidikan, khususnya bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
- Pengendalian kawasan lindung

Mendukung terciptanya lingkungan belajar yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan, sejalan dengan pendekatan *healing environment*.

- Pengembangan kawasan strategis
Membuka peluang peningkatan kualitas dan pemerataan fasilitas pendidikan sebagai bagian dari infrastruktur sosial wilayah.

Selain itu, dalam struktur ruang wilayah, sistem perkotaan dibagi berdasarkan hirarki pusat pelayanan yang turut menentukan skala dan jangkauan fasilitas pendidikan, yaitu:

- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
Berfungsi sebagai pusat pelayanan utama dengan cakupan luas, termasuk fasilitas pendidikan skala besar.
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
Berperan sebagai pusat pelayanan regional yang mencakup pendidikan, serta memiliki keterkaitan dengan kawasan permukiman dan aktivitas ekonomi.
- Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
Melayani kebutuhan antar kecamatan, termasuk fasilitas pendidikan dengan jangkauan menengah.

Berdasarkan hirarki tersebut, pengembangan Sekolah Inklusif Terpadu sebaiknya ditempatkan pada kawasan dengan hirarki PKL atau PPK, karena memiliki aksesibilitas yang baik, jangkauan pelayanan yang memadai, serta kedekatan dengan permukiman. Hal ini penting untuk mendukung pemerataan akses pendidikan, khususnya bagi peserta didik berkebutuhan khusus, sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan responsif terhadap konteks wilayah.

3.3 Data Demografis dan Sosial Ekonomi

Pada tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Boyolali tercatat sebesar 1.090.131 jiwa yang tersebar di 22 kecamatan, meningkat dari 1.079.952 jiwa pada tahun 2022. Meskipun laju pertumbuhan penduduk tergolong relatif rendah, peningkatan jumlah penduduk ini tetap memiliki

implikasi penting terhadap kebutuhan pelayanan dasar, khususnya di bidang pendidikan

Tabel 25 Jumlah Penduduk Kecamatan di Boyolali

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu)	Kawasan/ Wilayah Per Km2
1	Selo	30,142	500
2	Ampel	41.445	1.316
3	Cepogo	61.054	1.107
4	Musuk	32.649	914
5	Boyolali	74.150	2.498
6	Mojosongo	41.345	1,347
7	Teras	53.524	1.699
8	Sawit	32.622	1.761
9	Banyudono	54.074	1.985
10	Tamansari	29.376	673
11	Gladagsari	43.249	689
12	Wonosamudro	31.958	526
13	Sambi	48.553	964
14	Ngemplak	99.782	2.455
15	Nogosari	74.298	1.335
16	Simo	50.836	990
17	Karanggede	47.906	1.024
18	Klego	49.891	886
19	Andong	62.535	1.112
20	Kemus	35.197	518
21	Wonosegoro	39.564	687
22	Juwangi	35.979	373

Sumber : Pemda Boyolali (2021)

Struktur penduduk, atau jumlah penduduk menurut kelompok umur, memberikan Gambaran lebih jauh mengenai situasi demografi. Secara umum, persebaran penduduk di Kabupaten Boyolali merata di semua kelompok umur.

Tabel 26 Jumlah Penduduk Umur 0-14 di Boyolali

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	41.737	40.249	81.986
5-9	40.193	38.273	78.466
10-14	40.696	38.720	79.416

Sumber : Pemda Boyolali (2021)

Tinjauan Sarana Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2019, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan yang merata, berkualitas, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan hak setiap warga negara atas pendidikan bermutu, termasuk anak berkebutuhan khusus melalui sistem pendidikan inklusif, serta diperkuat oleh Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 yang mengatur penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus dalam satu lingkungan pendidikan yang sama.

Dalam konteks tersebut, tanggung jawab pemerintah daerah dalam bidang pendidikan dapat dirumuskan ke dalam beberapa aspek utama sebagai berikut:

1. Pemerataan Akses Pendidikan, yaitu menjamin tersedianya layanan pendidikan yang dapat diakses seluruh masyarakat, termasuk ABK, melalui penyediaan sarana dan prasarana yang inklusif dan terjangkau.
2. Penyediaan Fasilitas Pendidikan yang Layak dan Adaptif, yaitu menghadirkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, serta mendukung kebutuhan fisik dan psikologis peserta didik sesuai standar inklusivitas.
3. Peningkatan Kualitas Proses Pembelajaran, yaitu mendorong penyelenggaraan pendidikan berkualitas melalui kurikulum adaptif, tenaga pendidik profesional, dan metode pembelajaran yang responsif terhadap keberagaman peserta didik.
4. Akses terhadap Informasi dan Layanan Pendidikan, yaitu memberikan kemudahan akses terhadap informasi, layanan konseling, dan dukungan pendidikan bagi peserta didik dan orang tua.
5. Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat, yaitu mendorong keterlibatan aktif masyarakat melalui program edukasi inklusi, kelompok dukungan orang tua, serta kolaborasi dengan berbagai pihak terkait.

Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada penciptaan lingkungan belajar yang holistik, adaptif, dan berkelanjutan. Dalam konteks perancangan arsitektur, hal ini menuntut kehadiran fasilitas pendidikan yang mampu mengakomodasi keberagaman pengguna, mendukung interaksi sosial tanpa diskriminasi, serta menciptakan ruang yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh.

Tabel 27 Jumlah Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) di Boyolali

Kecamatan Subdistrict	Sekolah/ Schools					
	Negeri/ Public		Swasta/Private		Jumlah/ Total	
	2024/ 2025	2025/ 2026	2024/ 2025	2025/ 2026	2024/ 2025	2025/ 2026
Selo	-	-	16	16	16	16
Ampel	-	-	17	18	17	18
Gladagsari	1	1	21	22	22	23
Cepogo	-	-	33	33	33	33
Musuk	-	-	16	16	16	16
Tamansari	-	-	20	20	20	20
Boyolali	1	1	49	50	50	51
Mojosongo	-	-	30	30	30	30
Teras	-	-	29	20	29	30
Sawit	-	-	17	16	17	16
Banyudono	-	-	32	32	32	32
Sambi	-	-	29	29	29	29
Ngemplak	-	-	52	55	52	55
Nogosari	-	-	36	37	36	37
Simo	-	-	25	25	25	25
Karanggede	-	-	23	23	23	23
Klego	-	-	22	22	22	22
Andong	-	-	25	25	25	25
Kemusu	-	-	12	12	12	12
Wonosegoro	1	1	15	15	16	16
Wonosamodro	-	-	15	15	15	15
Juwangi	-	-	18	18	18	18
Kabupaten Boyolali	3	3	552	559	555	562

Sumber : Buku Kabupaten Boyolali Dalam Angka (2026)

Tabel 28 Jumlah Sekolah Dasar (SD) di Boyolali

Kecamatan Subdistrict	Sekolah/ Schools					
	Negeri/ Public		Swasta/Private		Jumlah/ Total	
	2024/ 2025	2025/ 2026	2024/ 2025	2025/ 2026	2024/ 2025	2025/ 2026
Selo	22	22	-	-	22	22
Ampel	21	21	2	2	23	23
Gladagsari	21	21	-	-	21	21
Cepogo	34	34	3	3	37	37
Musuk	20	20	-	-	20	20
Tamansari	22	22	1	1	23	23
Boyolali	30	30	7	7	37	37
Mojosongo	33	33	3	3	36	36
Teras	25	25	2	3	27	27
Sawit	21	21	1	1	22	22
Banyudono	29	29	4	4	33	33
Sambi	27	27	4	4	31	31
Ngemplak	32	32	1	1	33	33
Nogosari	26	26	4	4	30	30
Simo	25	25	4	4	29	29
Karanggede	23	23	2	2	25	25
Klego	24	24	1	1	25	25
Andong	31	31	2	2	33	33
Kemusu	20	20	-	-	20	20
Wonosegoro	17	17	1	1	18	18
Wonosamodro	16	16	-	-	16	16
Juwangi	24	24	-	-	24	24
Kabupaten Boyolali	543	543	42	43	585	585

Sumber : Buku Kabupaten Boyolali Dalam Angka (2026)

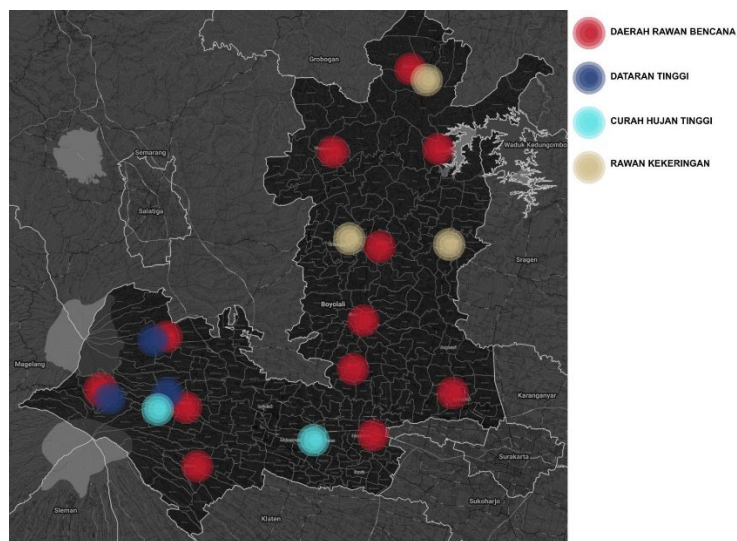
Daftar Sekolah Inklusif Jenjang TK dan SD di Kabupaten Boyolali

Tabel 29 Daftar Sekolah Inklusif Jenjang TK dan SD di Kabupaten Boyolali

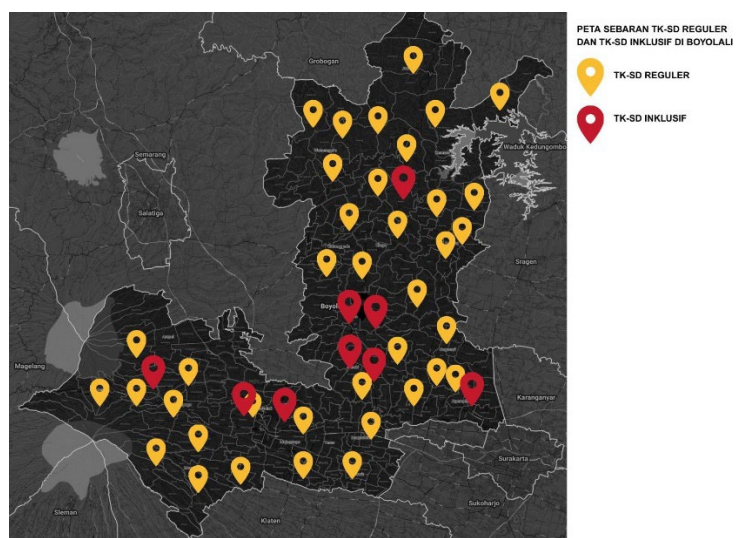
No	Jenjang	Nama Sekolah
1	TK	TK Pertiwi Talakbroto
2	TK	TK PGRI Jaten
3	TK	TK Pertiwi 1 Senting
4	TK	TK Pertiwi Tempursari
5	TK	TK Aisyiyah Al-Huda PK
6	TK	TK Budi Mulia
7	TK	TK Pertiwi 1 Canden
8	SD	SD Negeri 2 Pelem
9	SD	SD Negeri 1 Sumber
10	SD	SD Negeri 2 Walen
11	SD	SD Negeri 1 Tawengan
12	SD	SD Negeri 2 Jagoan

13	SD	SD IT Nur Hasan
14	SD	SD Negeri 3 Sawahan
15	SD	SD Negeri 2 Metuk
16	SD	SD Negeri 1 Mojosongo
17	SD	SD Negeri 1 Siswodipuran
18	SD	SD Negeri 3 Kiringan
19	SD	SD Negeri Mulyosari
20	SD	SD Negeri 1 Sawahan

Sumber: Pusdatin Kemendikbudristek 2026 (Data Referensi PDBK).Dapodikdasmen Wilayah Kabupaten Boyolali. Diolah Penulis (2026).
3.4 Pemilihan Kecamatan :



Gambar 28 Peta Pemilihan Wilayah
Sumber (Analisis Penulis, 2026)



Gambar 29 Peta Sebaran Sekolah diKabupaten Boyolali
Sumber (Analisis Penulis, 2026)

Berdasarkan analisis kondisi fisik, tata ruang, dan demografis Kabupaten Boyolali, Kecamatan Mojosongo ditetapkan sebagai kawasan terpilih untuk pengembangan Sekolah Inklusif Terpadu TK–SD, dengan beberapa pertimbangan utama.

Secara fisik, kawasan ini memiliki topografi landai pada ketinggian ± 75 –400 mdpl dengan kondisi lahan yang stabil, mendukung penerapan prinsip *universal design* serta pengembangan ruang terbuka hijau sebagai bagian dari pendekatan *healing environment*. Dari sisi aksesibilitas, lokasi yang strategis di kawasan perkembangan Solo Raya dan berdekatan dengan Kota Surakarta menjadikan kawasan ini mudah dijangkau dari berbagai arah. Dalam RTRW, Kecamatan Mojosongo diarahkan sebagai kawasan pengembangan permukiman perkotaan dengan fungsi campuran termasuk fasilitas pendidikan, sehingga pengembangan sekolah ini memiliki dasar perencanaan yang kuat.

Dari aspek demografis, keberadaan ± 30 TK dan ± 36 SD menunjukkan aktivitas pendidikan yang berkembang. Namun jumlah sekolah inklusif masih sangat terbatas, sehingga keberadaan Sekolah Inklusif Terpadu menjadi kebutuhan sekaligus peluang penting untuk meningkatkan akses pendidikan yang setara bagi seluruh anak. Sementara itu, tingkat kerawanan bencana yang relatif rendah dibanding kawasan pegunungan menjadikan kawasan ini cukup aman, meskipun potensi genangan akibat curah hujan tinggi tetap perlu diantisipasi melalui sistem drainase yang memadai.

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, Kecamatan Mojosongo dinilai memiliki potensi tinggi sebagai lokasi Sekolah Inklusif Terpadu yang inklusif, aman, nyaman, dan berkelanjutan.

Tabel 30 Analisis Pemilihan Kecamatan Mojosongo

Aspek Analisis	Kondisi Kecamatan Mojosongo	Implikasi terhadap Perancangan
Topografi	Datar (± 75 –400 mdpl)	Mendukung desain aksesibel, sirkulasi ramah difabel, dan kemudahan konstruksi

Aksesibilitas	Dekat Kota Surakarta, jaringan jalan baik	Memudahkan pencapaian pengguna dan memperluas jangkauan layanan pendidikan
Tata Ruang (RTRW)	Kawasan permukiman perkotaan fungsi campuran	Sesuai untuk pengembangan fasilitas pendidikan
Demografi	Penduduk cukup padat, ± 30 TK dan ± 36 SD	Menunjukkan kebutuhan dan potensi pengembangan sekolah inklusif
Lingkungan & Iklim	Curah hujan tinggi, lingkungan cukup subur	Mendukung konsep ruang terbuka hijau dan healing environment
Kebencanaan	Risiko relatif rendah, potensi genangan & lahar	Perlu sistem drainase dan mitigasi bencana
Potensi Pengembangan	Kawasan berkembang di Solo Raya	Mendukung pengembangan fasilitas pendidikan skala kawasan

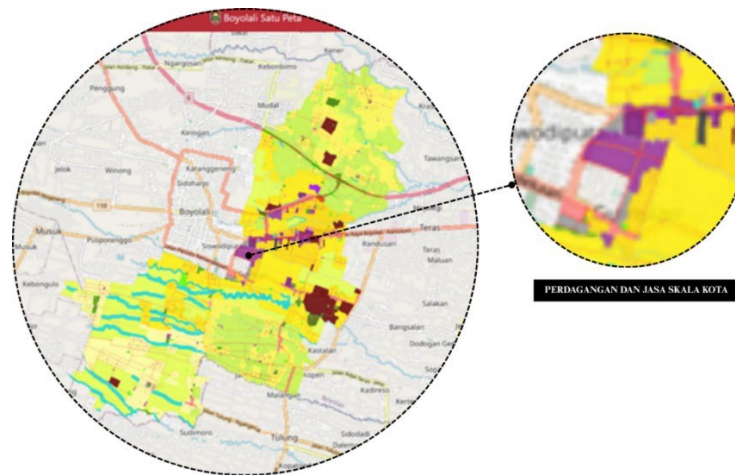
Sumber: Analisis Penulis berdasarkan BPS Kabupaten Boyolali (2024), RPJMD Boyolali (2021), dan RTRW Kabupaten Boyolali (2019).

3.5 Tinjauan Pemilihan Site

Pemilihan lokasi tapak (site) untuk perancangan Sekolah Inklusif Terpadu perlu mempertimbangkan berbagai aspek yang mengacu pada standar nasional perencanaan sarana pendidikan, seperti Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana, Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif, serta prinsip perencanaan lingkungan binaan yang aman, nyaman, dan aksesibel.

Selain itu, pemilihan site juga harus memperhatikan kesesuaian dengan RTRW dan RDTR setempat agar pengembangan fasilitas pendidikan dapat berjalan secara legal, fungsional, dan berkelanjutan. Dalam konteks sekolah inklusif, kriteria pemilihan site tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis, tetapi juga aspek psikologis, keamanan, serta aksesibilitas bagi peserta didik berkebutuhan khusus (ABK).

3.5.1 Dasar Pertimbangan Kriteria Pemilihan Site



Gambar 30 Peta Pemilihan Site
Sumber (RDTR Kabupaten Boyolali, 2026)

Berdasarkan hasil analisis terhadap kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Boyolali, Kecamatan Mojosongo dipilih sebagai lokasi pengembangan Sekolah Inklusif Terpadu Jenjang TK–SD karena memiliki kesesuaian terhadap fungsi kawasan serta potensi pengembangan fasilitas pendidikan di masa mendatang. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boyolali serta arahan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan perkotaan, Kecamatan Mojosongo diarahkan sebagai kawasan pengembangan permukiman perkotaan dengan fungsi campuran yang meliputi perdagangan, jasa, serta fasilitas umum. Dalam struktur ruang tersebut, fasilitas pendidikan termasuk dalam kategori fasilitas pelayanan umum yang diperbolehkan dan didorong keberadaannya untuk mendukung kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan Sekolah Inklusif Terpadu di Kecamatan Mojosongo dinilai sesuai dengan arahan tata guna lahan serta memiliki potensi untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan pendidikan di wilayah tersebut.

Selain sesuai secara regulatif, Kecamatan Mojosongo juga memiliki karakteristik kawasan yang mendukung perancangan sekolah inklusif, seperti lingkungan yang relatif berkembang, aksesibilitas yang baik terhadap jalan kolektor maupun jalan lingkungan, serta berada pada kawasan permukiman yang menjadi target utama pengguna fasilitas pendidikan dasar. Kondisi

lingkungan yang masih memiliki kualitas udara relatif baik dan kepadatan bangunan yang tidak terlalu tinggi juga mendukung penerapan konsep healing environment melalui integrasi ruang terbuka hijau dan lingkungan belajar yang sehat.

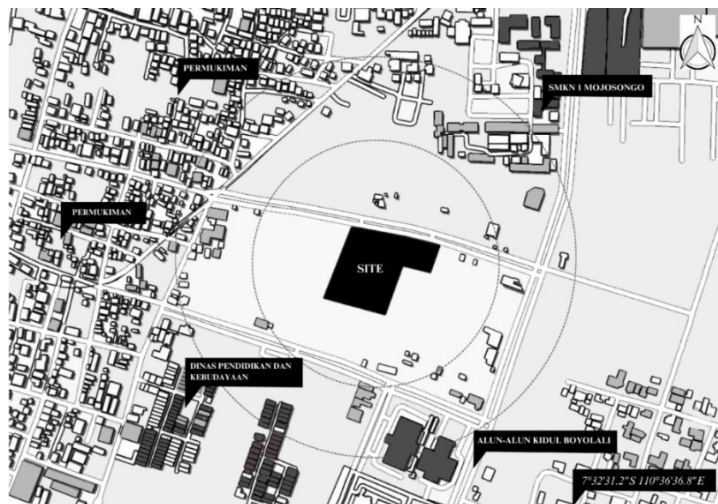
Tabel 3.8 Pemilihan Site

No	Aspek Pertimbangan	Kriteria Pemilihan	Dasar Pertimbangan
1	Kesesuaian Tata Ruang	Berada pada zona yang memperbolehkan fungsi Pendidikan/ fasilitas umum	Mengacu pada RTRW & RDTR Kabupaten Boyolali serta prinsip kesesuaian tata guna lahan (UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang)
2	Aksesibilitas	Mudah dijangkau kendaraan umum maupun pribadi	Standar keselamatan lingkungan sekolah (Permendiknas No. 24/2007); penting bagi anak usia dini dan ABK
3	Kemanan Lingkungan	Jauh dari area berbahaya (industri, jalan arteri padat, sungai rawan banjir)	Mendukung keamanan peserta didik usia dini dan ABK
4	Tingkat Kebisingan	Berada pada area dengan intensitas kebisingan rendah–sedang	SNI 03-6386-2000 (kenyamanan akustik); penting untuk konsentrasi belajar dan sensitivitas sensorik ABK
5	Luas Lahan	Memenuhi kebutuhan ruang dan memungkinkan pengembangan	Permendiknas No. 24 Tahun 2007 (standar luas minimum per siswa); mendukung fleksibilitas dan pengembangan sekolah
6	Kondisi Lingkungan	Memiliki kualitas udara baik, tidak tercemar, tersedia ruang terbuka	Mendukung kesehatan dan konsep healing environment; sesuai prinsip sekolah sehat (WHO & UNICEF)
7	Utilitas Kawasan	Tersedia jaringan air, listrik, drainase, dan telekomunikasi	Standar kelayakan bangunan pendidikan (Permendiknas No. 24/2007)
8	Topografi Lahan	Relatif datar atau landai	Mendukung aksesibilitas universal (Permen PUPR No. 14 Tahun 2017 tentang kemudahan bangunan gedung)
9	Kebencanaan	Berada pada zona Risiko bencana rendah	Mengacu pada prinsip mitigasi bencana (BNPB, RPJMD);

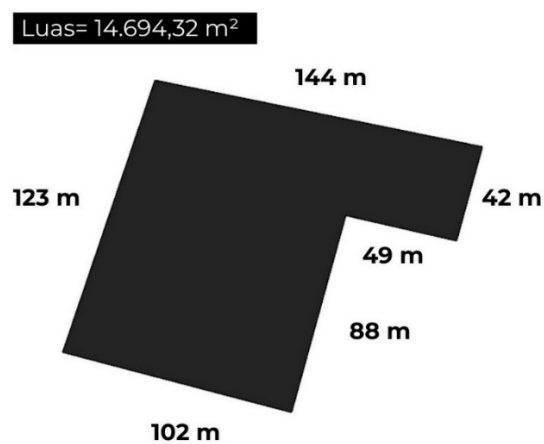
No	Aspek Pertimbangan	Kriteria Pemilihan	Dasar Pertimbangan
			penting untuk keselamatan pengguna
10	Potensi Pengembangan	Memiliki peluang perkembangan kawasan jangka panjang	Mendukung keberlanjutan fungsi bangunan di masa depan

Sumber: Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana, Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif,

3.5.2 Site Terpilih



Gambar 31 Site Terpilih
Sumber (Dokumen, 2026)



Gambar 32 Ukuran Site
Sumber (Dokumen, 2026)

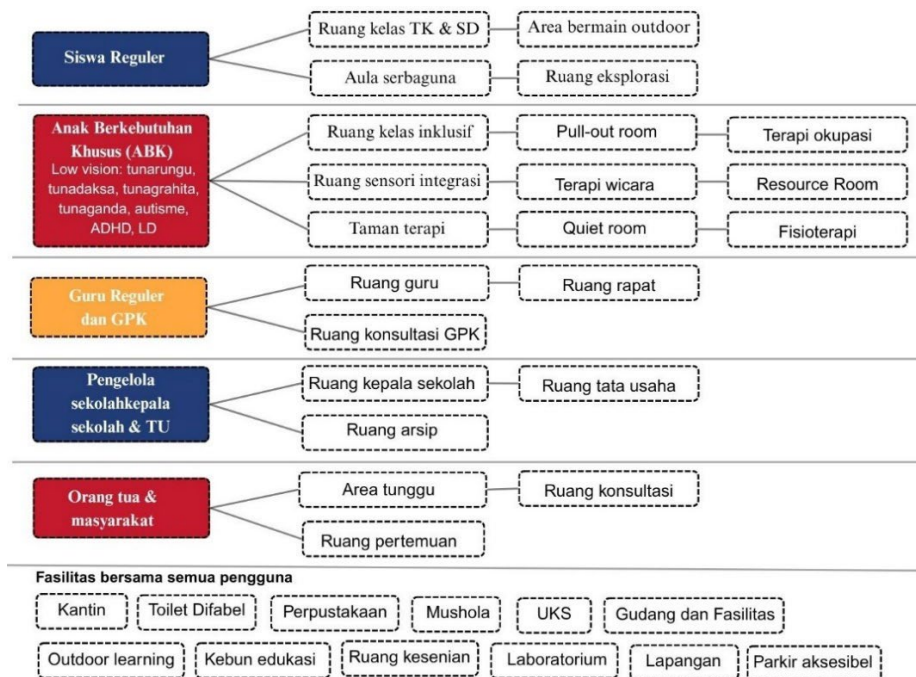
Tabel 31 Site Terpilih

Aspek	Klasifikasi
Tata Guna Lahan	Berada pada zona yang diperuntukkan bagi fungsi pendidikan dan fasilitas umum, sesuai dengan RTRW/RDTR Kabupaten Boyolali sehingga mendukung pengembangan sekolah inklusif terpadu.
Batasan Site	Utara : Jalan Area Kebun
	
	Selatan : Lahan Kosong
	
	Timur : Lahan Kosong
	
	Barat: Lahan Kosong

Aspek	Klasifikasi
	
Kondisi Kontur Tanah	Relatif datar dengan kemiringan $\pm 0-5\%$, sehingga memudahkan pengolahan tapak dan mendukung aksesibilitas bagi seluruh pengguna, termasuk ABK.
Potensi Rawan Bencana	Termasuk kawasan dengan risiko rendah terhadap bencana besar, namun tetap memerlukan perencanaan drainase yang baik untuk mengantisipasi genangan air hujan.
Tingkat Polusi	Tingkat polusi udara dan kebisingan relatif rendah karena berada di kawasan non-industri, sehingga mendukung kenyamanan lingkungan belajar.

Sumber: Analisis Penulis (2026)

3.6 Gagasan Perancangan



Gambar 33 Gagasan Perancangan
Sumber (Analisis, 2026)

Perancangan ini mengembangkan konsep *Integrated Inclusive Kindergarten–Elementary School*, yaitu integrasi sistem pendidikan TK dan SD dalam satu kawasan terpadu yang berkelanjutan, bertujuan menciptakan kesinambungan pembelajaran agar peserta didik berkembang secara bertahap tanpa terdisrupsi pada masa transisi antar jenjang.

Kelompok pengguna yang diwadahi terdiri dari lima kelompok utama. Siswa reguler membutuhkan ruang kelas TK dan SD, aula serbaguna, area bermain *outdoor*, dan ruang eksplorasi. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) meliputi *low vision*, tunarungu, tunadaksa, tunagrahita, autisme, ADHD, dan *learning disabilities* memerlukan ruang kelas inklusif, *pull-out room*, ruang sensori integrasi, terapi wicara, terapi okupasi, fisioterapi, *resource room*, taman terapi, dan *quiet room*. Guru reguler dan Guru Pendamping Khusus (GPK) difasilitasi dengan ruang guru, ruang rapat, dan ruang konsultasi GPK. Pengelola sekolah membutuhkan ruang kepala sekolah, tata usaha, dan ruang arsip. Orang tua dan masyarakat diakomodasi melalui area tunggu, ruang konsultasi, dan ruang pertemuan. Seluruh kelompok pengguna juga dilayani oleh fasilitas bersama yang mencakup kantin, toilet difabel, perpustakaan, mushola, UKS, gudang, *outdoor learning*, kebun edukasi, ruang kesenian, laboratorium, lapangan, dan parkir aksesibel.

Pendekatan *Healing Environment* diwujudkan melalui integrasi elemen alam seperti vegetasi, pencahayaan alami, ventilasi silang, dan ruang terbuka hijau, yang berfungsi sebagai media terapi dan relaksasi. Ruang-ruang khusus seperti *quiet room*, taman terapi, dan area transisi disediakan khusus untuk membantu ABK dalam mengelola stres dan overstimulasi sensorik.

Pendekatan *Holistic Learning* diterapkan melalui penyediaan ruang belajar yang variatif — kelas fleksibel, ruang eksplorasi, ruang terapi, kebun edukasi, dan *outdoor learning* — yang mengintegrasikan perkembangan kognitif, sosial, emosional, sensorik, dan fisik peserta didik secara menyeluruh. Prinsip *Universal Design* diterapkan melalui ramp, koridor

lebar, toilet difabel, signage komunikatif, dan parkir aksesibel untuk memastikan seluruh pengguna dapat beraktivitas secara mandiri dan tanpa hambatan.

Secara arsitektural, strategi perancangan diwujudkan melalui integrasi fungsi pendidikan dan terapi, pembentukan ruang yang adaptif dan fleksibel, lingkungan yang aman dengan pengawasan visual optimal, serta penguatan interaksi sosial inklusif melalui ruang komunal dan *shared space*. Prinsip *Universal Design* diterapkan secara menyeluruh melalui ramp, koridor lebar, toilet difabel, signage komunikatif, dan parkir aksesibel guna memastikan kemandirian seluruh pengguna tanpa hambatan.

Dengan demikian, perancangan Sekolah Inklusif Terpadu TK–SD di Kabupaten Boyolali ini tidak sekadar memenuhi kebutuhan ruang pendidikan formal, tetapi menghadirkan lingkungan belajar yang inklusif, adaptif, dan suportif melalui pendekatan *healing environment* dan pembelajaran holistik, sehingga seluruh peserta didik — baik reguler maupun ABK — dapat berkembang secara optimal dalam aspek kognitif, emosional, sosial, dan fisik.